TESIS

BUDAYA POLITIK MASYARAKAT ADAT KARAMPUANG DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD KAB. SINJAI TAHUN 2019

Disusun dan diajukan Oleh:

ABD. RAHMAN MAKKATUO E052182001



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

TESIS

BUDAYA POLITIK MASYARAKAT ADAT KARAMPUANG DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD KAB. SINJAI TAHUN 2019

Disusun dan diajukan Oleh:

ABD. RAHMAN MAKKATUO E052182001

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

BUDAYA POLITIK MASYARAKAT ADAT KARAMPUANG DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD KAB. SINJAI TAHUN 2019

Disusun dan diajukan oleh

ABD. RAHMAN MAKKATUO

E052182001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

pada tanggal 10 Februari 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.

Nip. 19621231 199003 1 023 .

Prof. Dr. Nurlina, M.Si. Nip. 19630921 198702 2 001

ditik Universitas Hasanuddin,

Ketua Program Studi Ilmu Politik,

Yunus, S.IP., M.Si. Kullas Ilmu So

710705 199803 2 002

Prof!/Dr. H. Armin, M.Si.

19651109 199103 1 008

PENDIDIKAN Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Abd. Rahman Makkatuo

NIM

: E052182001

Program Studi

: (S2) Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Februari 2021

Yang menyatakan,

Abd. Rahman Makkatuo E052182001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt, pemilik segala sesuatu yang kepadanyalah kita sebagai hambanya akan menghadapkan amal yang dilakukan selama berada didunia fana ini. Kasih dan sayang Allah swt untuk manusia sebagai makhluk yang paling istimewa diantara semua makhluk yang diciptakan semata-mata untuk menyembah dan bersujud kepadanya. Allah swt pula yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia sehingga kita dapat menjalani hidup seperti sekarang ini, maha suci Allah swt atas seagala rahmatnya. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada nabi Muhammad saw yang karena perjuangan dan pengorbanan beliaulah sehingga kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan moral dan etika, beliau juga sebagai pahlawan yang revolusioner ditengah krisis kepemimpinan dimasa suram umat manusia pada zamannya. Semoga Allah swt meridhoinya dan merahmati segala perjuangan dan pengorbanan beliau untuk agama dan era yang cerah bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini adalah berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Teristimewa kepada Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda
 Ermawati tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, perhatian dan motivasi dukungan serta doa yang tulus dalam keberhasilan penulisan sampai sekarang ini.
- Ibu Prof Dr. Dwia Aries Tina Palubuhan, MA., selaku rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi pada Program Strata - 2 (S2) Universitas Hasanuddin.
- Bapak Prof. Armin Arsyad, M.Si., selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin.
- 4. Ibu **Dr. Arina yunus, S. IP., M. Si.,** selaku ketua magister ilmu politik pasca sarjana Universitas Hasanuddin.
- 5. Bapak Drs. H. A. Yakub, Ph.D. selaku dosen pembimbing I dan Prof. Dr. Nurlina, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan ide kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
- Bapak Prof. Dr. M. Basir, M.Ag., Dr. Jayadi Nas, S.Sos.,
 M.Si., dan Dr. Phil. Sukri, M.Si., sebagai Penguji dalam ujian tesis yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.
- 7. Segenap dosen, pegawai dan seluruh staf Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang

telah memberikan Ilmu pengetahuan dalam bidang politik,

motivasi, nasihat, dan pelayanannya selama penulis dalam

proses perkuliahan.

8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi

selama kuliah sampai penyelesaian tesis ini dan semua pihak

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

9. Kepada teman-teman Pascasarjana Ilmu Politik angkatan 2018,

dan junior yang telah memberikan senior semangat,

kebersamaan dan bantuannya kepada penulis selama

menumpuh perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.

10. Kepada Informan yang telah membantu penulis dalam mencari

dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini terdapat kekurangan.

Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari semua pihak sangat

penulis harapkan. Semoga segala dukungan dan bantuan semua pihak

mendapatkan pahala dari Allah swt. semoga karya ini dapat bermanfaat

bagi kita semua. Aamiin.

Pattalassang, 10 Februari 2021

Abd. Rahman Makkatuo

E052182001

vi

ABSTRAK

ABD. RAHMAN MAKKATUO. Budaya Politik Masyarakat Adat Karampuang dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (dibimbing oleh A. Yakub dan Nurlina).

Penelitian ini bertujuan menganalisis sikap dan perilaku politik serta preferensi masyarakat adat Karampuang dalam memilih calon legislatif DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, perilaku orang, atau keadaan di tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Teori yang digunakan adalah budaya politik, partisipasi politik, dan konsep perilaku pemilih. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder menggunakan teknik dokumenter dan metode kajian pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis terhadap hasil wawancara berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan perilaku politik masyarakat adat Karampuang dalam memilih calon legislatif dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 didasari empat kriteria dalam memilih, yakni (1) masyarakat adat Karampuang masih mengedepankan ikatan primordialisme antara calon legislatif dan masyarakat setempat, (2) pengaruh ketokohan dari seorang caleg yang ingin dipilih nantinya, (3) pengaruh politik uang menjelang pemilihan, dan (4) jumlah partai politik yang ada di Indonesia semakin banyak. Hasil lain menunjukkan bahwa preferensi masyarakat adat Karampuang dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah mereka lebih cenderung memilih calon legislatif yang memiliki ketokohan di masyarakat dibandingkan dengan hanya melihat caleg dari segi asal daerahnya.

Kata kunci: masyarakat Karampuang, preferensi, perilaku memilih, budaya politik

ABSTRACT

ABD. RAHMAN MAKKATUO. The Political Culture of The Karampuang Indigenous Community in The Legislative Election of The Sinjai Regency DPRD in 2019 (Supervised by A. Yakub and Nurlina)

This research is about the Political Culture of the Karampuang Indigenous Community in the Legislative Election of the Sinjai Regency DPRD in 2019. This research aims to analyze the Attitudes and Political Behavior of the Karampuang Indigenous People in choosing Legislative Candidates in the Legislative Election of the Sinjai Regency DPRD in 2019 and to analyze the preferences of the Karampuang Indigenous People in the Legislative Election of the DPRD Sinjai Regency in 2019.

The type of research used was research, qualitative, namely describing events or incidents, the behavior of people or circumstances in a certain place in detail and in depth in the form of a narrative. The theories used in this thesis were (1) Political Culture; (2) Political Participation; and (3) The Concept of Voter Behavior. The primary data collection method in this thesis used the interview method, while the secondary data used the documentary method and the literature review method. The data analysis method used was the descriptive analysis of the interview results, the research described and analyzed based on the theoretical framework used in this study.

The results of the study indicate that the attitudes and political behavior of the Karampuang Indigenous Peoples in choosing Legislative Candidate in the Legislative Election of Sinjai Regency DPRD in 2019 are based on four criteria in choosing. First, the Karampuang indigenous people still prioritize primordial ties between legislative candidates and local communities. Second, the influence of the character of a candidate who wants to be elected later. Third, the influence of money politics before the election. Fourth, the number of political parties in Indonesia is increasing. In addition, this study also shows that the Karampuang Indigenous Peoples' Preference in the Legislative Election of the Sinjai Regency DPRD in 2019 that they are more likely to choose legislative candidates who have prominent figures in society than just looking at candidates from the perspective of their regional origin.

Keywords: Karampuang Society, Preference, Voting Behavior, Political Culture



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUI	Li
HALAMAN PENG	ESAHANii
PERNYATAAN KE	EASLIAN TESISiii
KATA PENGANTA	ARiv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BABI PENDAHU	JLUAN
1.1 Latar Belak	ang 1
1.2 Rumusan N	Masalah
1.3 Tujuan Pen	nelitian7
1.4 Manfaat Pe	enelitian8
BAB II TINJAUAN	N PUSTAKA
2.1 Budaya Po	olitik9
2.2 Partisipasi	Politik
2.3 Konsep Pe	erilaku Pemilih30
2.4 Penelitian	Terdahulu
2.5 Kerangka	Pemikiran 4
BAB III METODE	PENELITIAN
3.1 Lokasi Per	nelitian43
3.2 Pendekata	n dan Jenis Penelitian43
3.3 Jenis Data	
3.4 Teknik Per	nentuan Informan48
3.5 Teknik Per	ngumpulan Data46
3.6 Teknik Ana	alisis Data49
BAB IV GAMBAR	AN UMUM
4.1 Gambaran	u Umum Kabupaten Sinjai
4.2 Sejarah M	asyarakat Adat Karampuang54

BAB V PEMBAHASAN

5.1	Sikap dan Perilaku Politik Masyarakat Adat Karampuang	
	dalam memilih Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif	
	DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019	66
5.2	Preferensi Masyarakat Adat karampuang dalam Pemilihan	
	Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019	85
5.3	Implikasi Teori	90
BAB IV	PENUTUP	
6.1	Kesimpulan	98
6.2	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		102
LAMPI	RAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik dalam pengertian yang ideal berusaha memanifestasikan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. Pandangan ideal ini secara rasional berangkat dari logika berpikir sederhana dengan dikotomi hitamputih; benar-salah. Aktivis politik yang berusaha mencapai impian menciptakan tatanan masyarakat yang baik akan menempuh jalan atau cara yang menurut kategorinya baik. Namun dalam riil politik, logika berpikir demikian sungguh kenyataan yang sukar untuk diterapkan. Ini disebabkan realitas yang terjadi di masyarakat yang sangat kompleks.

Budaya politik merupakan suatu landasan sistem dalam suatu politik yang memberikan suatu arahan dan peran politik yang dilakukan oleh struktur politik. Budaya politik ini merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Sansekerta dan bahasa Yunani. Kata "budaya" berasal dari bahasa Sanskerta "budhayah" yang berarti akal. Sedangkan politik merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu polis dan teta yang berarti kota atau negara. Jadi, budaya politik dapat diartikan sebagai suatu landasan akal dari suatu negara.

Secara garis besar, budaya politik dapat didefinisikan sebagai suatu pola perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya politik untuk berbangsa dan bernegara menyangkut berbagai pola perilaku masyarakat pada penyelenggaraan

administrasi negara, adat istiadat, hukum, politik pemerintah, dan norma kebiasaan dari masyarakat. Dalam suatu negara pasti mempunyai budaya politik yang berbeda-beda. Terjadinya suatu perbedaan pada budaya tersebut disebabkan oleh banyak hal, antara lain kondisi, situasi, dan pendidikan masyarakat dalam suatu negara.

Asal mula atau lahirnya suatu budaya politik pada dasarnya berasal dari lingkungan sekitar masyarakat. Hal itu karena masyarakatlah yang memiliki hak atau wewenang dalam membuat suatu kebijakan dan mengambil keputusan. Perlu diketahui bahwa suatu budaya politik yang ada dalam suatu negara akan mengalami sebuah perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut disesuaikan dengan pemikiran masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi pada saat itu.

Dalam perkembangannya, budaya politik di Indonesia terbagi menjadi tiga garis besar yakni: pertama, budaya politik tradisional atau keetnisan; kedua, budaya politik Islam yang mana merupakan suatu pendekatan terhadap agama Islam; ketiga, budaya politik modern yang mana merupakan suatu pendekatan untuk memajukan suatu keamanan yang stabil. Dalam studi budaya demokrasi di Indonesia, nampak selalu mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Karena itu, terjadinya suatu perubahan dalam budaya demokrasi satu negara seperti di Indonesia, sangat mempengaruhi kestabilitasan sistem politik nasional. Untuk itu, perlu adanya suatu studi tentang keberhasilan atau kegagalan dari suatu

rezim dalam sebuah negara. Studi tersebut tentunya berkaitan erat dengan dinamika politik di Indonesia dalam mengatur ketatanegaraan suatu kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Dari segi metodologinya (dalam Andi Yakub, 2019; John, 2013; Heywood, 2013), budaya politik tidak hanya memahami pengertian politik dalam pemahaman sempit dari segi sikap dan persepsi dalam membentuk suatu sistem pemerintahan. Teori budaya politik dapat dilihat secara lebih luas sebagai suatu proses pembangunan politik melalui interaksi antara sikap individu warganegara, bahasa dan sistem simbolik di mana mereka berada secara kontekstual. Teori budaya politik menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana identitas politik dihasilkan, atau bagaimana simbol, persepsi dan komunikasi politik atau retorik politik dapat mewujudkan kepatuhan atau konflik. Hal ini kemudian mengarah kepada pemahaman mengapa banyak komunitas etnis tertentu atau komunitas masyarakat tertentu mewujudkan sikap dan gejala khusus tertentu yang mungkin tidak dapat ditemukan pada konteks yang lain. Teori budaya politik memungkinkan kita menemukan analisa yang lebih mendalam atas suatu konsep politik yang mungkin dianggap berbeda dan tidak lazim dalam praktek-praktek politik modern dewasa ini.1

Berbicara mengenai budaya politik tidak terlepas dari perilaku politik masyarakat serta dinamika politik yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya dalam skala lokal. Pengkajian tentang perilaku

-

¹ Andi Yakub, "Dinamika Politik Bugis Sulawesi Selatan: Kesinambungan dan Perubahan Terhadap Politik Desentralisasi", *Disertasi*, (Malaysia: Ghazali Shafie Graduate School of Government, Universiti Utara Malaysia, 2019), hlm. 47.

politik yang merupakan bagian terpenting sebenarnya juga dapat dilihat dari kekentalan budaya politik suatu masyarakat, sejauh mana budaya politik itu mempengaruhi perilaku seseorng maka sejauh itu perilaku masyarakat mengikat secara keseluruhan. Dalam konteks politik lokal, terdapat beberapa budaya politik yang dapat kita temui di tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah masyarakat adat Karampuang yang terdapat Di kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Kelompok masyarakat ini terletak di kecamatan Bulupoddo desa Tompobulu. Sama seperti kelompok-kelompok adat pada umumnya, masyarakat adat Karampuang masih kental dengan nilai-nilai budaya dan dipimpin oleh satu orang kepala suku atau pemangku adat yang disebut *Arung* atau *To Matoa* dan dibantu oleh seorang *Gella*.

Arung atau To Matoa sangatlah dihormati karena setiap perkataan yang dia ucapkan adalah hal yang harus ditaati dan diteladani oleh masyarakatnya. Arung atau To Matoa mempunyai tanggung jawab untuk mengurus semua hal yang berhubungan dengan leluhur, orang-orang suci, atau dewa-dewa. Gella bertanggung jawab mengurus masalah tanah, pertanian, dan kemakmuran masyarakat. Sanro mengurus masalah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Guru mengurus masalah pendidikan dan keagamaan. Apabila salah satu di antara mereka ada yang meninggal, maka sebelum dimakamkan penggantinya sudah harus ditetapkan. Ketika Arung atau To Matoa yang meninggal, maka yang menetapkan penggantinya adalah Gella begitupun sebaliknya. Ketika

Guru dan Sanro yang meninggal, maka yang menetapkan penggantinya adalah Arung dan Gella.

Masyarakat Desa Tompobulu sebagian besar sudah menganut agama Islam, namun masih ada yang memiliki sistem kepercayaan yang relatif sama dengan animisme, terutama masyarakat yang bermukim dalam wilayah adat. Ritual-ritual yang dilakukan untuk melakukan persembahan kepada roh-roh nenek moyang sebagai suatu ucapan terima kasih dan bentuk permohonan agar ke depannya hidup menjadi lebih baik. Ada ketakutan tersendiri ketika tidak turut serta dalam proses pelaksanaan ritual, membuat masyarakat di wilayah adat Kampung Adat Karampuang sangat setia terhadap keyakinan mereka. Masyarakat yang tinggal dalam wilayah adat Kampung Adat Karampuang berjumlah 481 jiwa yang tercatat terdiri dari 133 kepala keluarga dengan laki-laki berjumlah 230 jiwa dan perempuan berjumlah 251 jiwa.

Kampung Adat Karampuang juga dilengkapi dengan aturan-aturan adat. Aturan adat ini telah mengikat masyarakatnya untuk tunduk dan patuh kepada pemangku adat. Aturan adatnya dikenal dengan hukum pabbatang, hukum pertama yang utama dan benar-benar hidup dalam kesadaran jiwa dan raga warga masyarakat Karampuang yang tercermin dalam aktivitas dan tindakan mereka dalam adat istiadat dan sosial budaya mereka dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. Peran pabbatang adalah sebagai bentuk penyelesaian sengketa bagi masyarakat Karampuang. Masyarakat Karampuang

menganggap bahwa hukum *pabbatang* merupakan hukum tertinggi dalam kawasan adat mereka.

Secara administratif, Masyarakat adat Karampuang terletak di wilayah Indonesia. Dengan demikian mereka menjalankan aturan-aturan yang dianut dengan tetap berdasar pada UUD 1945. Salah satu contoh dalam pelaksanaan UUD 1945 adalah Pemilihan Umum. Pemilu merupakan kegiatan yang melibatkan warga masyarakat untuk berpartisipasi tidak terkecuali kelompok-kelompok adat yang ada di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemilihan legislatif di tahun 2019 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sinjai berjalan lancar. Kesuksesan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Sinjai tidak terlepas dari peran masyarakat dalam membantu pihak penyelenggara. Dalam masyarakat adat Karampuang tentunya mereka mempunyai kriteria tersendiri mengenai sosok pemimpin atau wakil rakyat yang akan mereka pilih. Setiap orang mempunyai kriteria tersendiri dalam memilih seorang pemimpin, tetapi dalam konteks masyarakat adat mereka juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemangku adat. Dari hal itu pula konsep budaya politik tersebut sangat memungkinkan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemberian dukungan politik dalam pemilu pada konteks menjelang pemilihan anggota legislatif di kabupaten Sinjai tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis kemudian melakukan penelitian untuk mengembangkan kajian ini dengan judul: Budaya Politik Masyarakat Adat Karampuang dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dari permasalahan tersebut maka penulis kemudian merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana Sikap dan Perilaku Politik Masyarakat Adat Karampuang dalam memilih Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019?
- 1.2.2. Bagaimana Preferensi Masyarakat Adat karampuang dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan diatas, sebagai berikut :

- 1.3.1. Mengkaji dan menganalisis Sikap dan Perilaku Politik Masyarakat Adat Karampuang dalam memilih Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019.
- 1.3.2. Mengkaji dan menganalisis Preferensi Masyarakat Adat karampuang dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun empiris, yaitu:

1.4.1 Secara Akademis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara ilmiah mengenai Budaya Politik Masyarakat Adat Karampuang dalam Pemilihan Legislatif di kabupaten Sinjai Tahun 2019.
- b. Diharapkan menjadi referensi bagi akademisi-akademisi yang ingin melakukan penelitian ilmu politik terutama dalam bidang budaya politik.

1.4.2. Manfaat Praktis

 a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk masyarakat yang berminat dalam memahami dan mengkaji mengenai Budaya Politik.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

Penulis dalam menjelaskan kerangka pemikiran dan teori untuk menganalisa permasalahan tersebut menggunakan beberapa kerangka pemikiran yang terdiri atas:

2.1. Budaya Politik

Istilah "culture" yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata latin "corele" yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu "colere" kemudian "culture" diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. E.B. Tylor dalam Soekanto memberikan definisi isi mengenai kebudayaan ialah: "kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuankemampuan didapatkan oleh sebagai yang manusia anggota masyarakat".2

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan merupakan tujuan pribadi seseorang(private goals). Konsep-konsep pokok yang dikandung dalam pengertian politik adalah: Negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan

² Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 65.

(decision making), kebijakan (policy), serta pembagian (distribution) dan alokasi (allocation).³

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif pilihan. Pengambilan keputusan menunjuk kepada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat atau kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. ⁴

Menurut Almond dan Verba (dalam Andi Yakub, 2019), menggunakan teori budaya politik sebagai jembatan untuk menghubungkan antara sikap, persepsi dan motivasi individu-individu yang memainkan peranan dalam sistem politik dengan karakter dan penampilan sistem politik atau untuk menghubungkan sikap politik dengan struktur politik. Asusmsi teori ini adalah bahwa sebagaimana sikap seseorang mempengaruhi apa yang akan dilakukan, demikian juga

_

³ Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm 9.

⁴ Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm 9-13.

pengaruh budaya politik suatu bangsa terhadap tingkah laku warga masyarakat dan pemimpinnya dalam sistem politik.⁵

Almond dan Verba (dalam Andi Yakub, 2019) membagi tiga objekobjek orientasi politik yaitu: *Pertama*, sistem politik secara keseluruhan yang meliputi kognisi terhadap bangsa, seperti besar atau kecil, kuat atau lemah, merdeka atau tergantung dan penilaian terhadap bangsa dan sistem politik. *Kedua*, komponen-komponen sistem politik seperti sturktur politik, aktor-aktor politik dan keputusan-keputasan politik yang secara umum dapat di klarifikasi menjadi persoalan yaitu: apakah individu terlibat dalam proses politik? Atau dalam proses input? Atau dalam proses administrasi dalam proses output?. Proses input atau proses politik merupakan arus tuntutan masyarakat terhadap politik dan transformasi tuntutan ke dalam keputusan pemerintah. *Ketiga*, diri sendiri (*Self*) sebagai aktor politik yang meliputi esensi dan kualitas norma kewajiban politik pribadi seperti kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap sesama warganegara, kecendrungan menjaga harmoni atau konflik dan meliputi esensi dan kualitas kemampuan pribadi terhadap sistem politik.

Menurut Almond dan verba (dalam Andi Yakub, 2019), ketiga dimensi atau komponen orientasi itu saling berhubungan. Dimensi ini mungkin akan bergabung dengan berbagai cara, lebih tepatnya bagi individu atau aktor yang sama boleh mempertimbangkan berbagai aspek sistem politik. Jenis orientasi yang ada dalam kalangan masyarakat

⁵ Andi Yakub, "Dinamika Politik Bugis Sulawesi Selatan: Kesinambungan dan Perubahan Terhadap Politik Desentralisasi", *Disertasi*, (Malaysia: Ghazali Shafie Graduate School of Government, Universiti Utara Malaysia, 2019), hlm. 33.

mempunyai dampak terhadap struktur sistem politik. Budaya politik suatu banagsa bergantung pada frekuensi dari berbagai orintasi kognisi, afektif dan evaluasi terhadap sistem politik, terhadap input dan output sistem politik dan terhadap diri sendiri sebagai elit politik.⁶

Pertama, sebuah masyarakat atau bangsa dapat dikategorikan sebagai budaya politik parkial apabila orientasinya tidak terlihat terhadap sistem politik sebagai keseluruhan terhadap input dan output, dan terhadap diri sendiri sebagai elit politik. Dengan kata lain suatu masyarakat atau bangsa tidak mempunyai orientasi sama sekali terhadap objek politik. Masyarakat seperti ini tidak mempunyai peranan politik khusus yang dapat melaksanakan semua fungsi seperti agama, ekonomi, keluarga dan politik dalam keadaan lain pula pemerintah pusat tidak banyak mempengaruhi kesedaran anggota masyarakat desa atau sukusuku bangsa. Budaya politik parokial murni atau ekstrim ini biasanya wujud dalam masyarakat tradisional-sederhana, pengkhususan peranan politik belum nampak dan keterikatan primordial yang masih mendalam. Parokialisme dalam sistem politik yang belum terkhusus lebih bersifat afektif daripada kognisi dan evaluasi. Sebaliknya; parokialisme dalam sistem politik yang sudah dibesakan dan khusus dalam peranan-peranan politiknya adalah lebih cenderung bersifat afektif dan normatif ataupun evaluatif daripada bersifat kognitif

_

⁶ Ibid, hlm, 35-36

Kedua, apabila frekuensi orientasi terhadap sistem politik dan terhadap output itu sangat tinggi, manakala orientasi terhadap objek input dan terhadap diri sendin sebagai aktor politik sangat rendah, maka budaya politik seperti ini disebut sebagai subjek. Artinya, hubungan mereka terhadap suatu keputusan dan sistem sebagai keseluruhan pada dasarnya adalah bersifat pasif. Jenis budaya politik ini kemungkinan besar wujud dalam masyarakat yang tidak mempunyai struktur input yang Orientasi subjek sistem dibesakan. dalam politik vang telah mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi lebih cenderung bersifat subjektif dan normatif daripada bersifat kognitif.

Ketiga, budaya politik partisipan adalah pola sikap dan orientasi anggota masyarakat yang cenderung secara jelas berorientasikan sistem politik secara keseluruhan terhadap objek dan proses input, objek dan proses output, dan diri sendiri sebagai aktivis dalam proses politik. Persepsi dan orientasi yang berkembang dalam sistem politik ini adalah kognisi, afektif, dan normative/evaluatif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ketiga-tiga unsur orientasi itu wujud dalam diri individu, maka ketiga-tiga budaya politik itu juga tidak menganggap bahawa satu jenis budaya politik menggantikan budaya politik lain. Oleh itu, warga dari suatu sistem politik peserta misalnya, tidak hanya berorientasikan proses input (aktif dalam proses politik), tetapi juga tunduk pada undang-undang dan kekuasaan pemerintah, disamping menjadi anggota dari suatu kelompok primer (suku, etnik, daerah, agama). Fenomena ini berlaku kerana,

klasifikasi budaya politik itu tidak menganggap wujud adanya keseragaman dalam budaya politik. Maksudnya sistem politik yang mempunyai budaya politik penglibatan sebagai faktor dominan juga akan mempunyai budaya politik parokial dan subjek dalam sistem politik tersebut. Dengan itu, itulah sebabnya, Almond dan Verba (1990) menyimpulkan bahawa semua budaya politik dari setiap sistem politik merupakan budaya politik campuran (*mix political culture*).

Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan, dan sebagainya. Menurut Samuel H.Beer dan Adam B. Ulam serta Gilbert Abcarian dan George S. Masannat, umumnya dianggap dalam sistem politik terdapat empat variabel, yaitu: (1) kekuasaan-sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain kelompok-kelompok membagi sumber-sumber di antara dalam masyarakat; (2) kepentingan-tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelakupelaku atau kelompok politik; (3) kebijakan-hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan; serta (4) budaya politik-orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik.8 Jadi, menurut mereka, budaya politik merupakan salah satu variabel dari sistem politik.

.

⁷ Ibid, hlm. 38.

⁸ Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm 49.

Menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo, MA., salah satu aspek penting dalam system politik adalah budaya politik (*political culture*) yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikapsikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik.⁹

2.1.1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang di dalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah budaya politik. Di dalam sebuah masyarakat di mana sikap dan orientasi politiknya sangat didominasi oleh karakteristik yang bersifat afektif maka

_

⁹ Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm 59.

akan membentuk budaya politik yang parokial. Masyarakat sama sekali tidak menyadari untuk apa mereka melakukan kegiatan politik. Kesadaran kognitif politiknya terbatas pada pengetahuan bahwa kekuasaan politik memang ada dalam masyarakat, dan keikutsertaannya lebih banyak karena mobilisasi, solidaritas atau ikut-ikutan.¹⁰

Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Barangkali, mereka adalah orang-orang yang buta huruf atau masyarakat yang hidup di daerah terpencil yang sama sekali tidak sadar (aware) terhadap hak pililh dan pemnerintahannya. Oleh karena itu, terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, hanya bisa bila terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik di mana ikatan scorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Di dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apa pun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Individu hanya merasa bahwa mereka terikat dengan

¹⁰ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 85.

kekuasaan yang dekat dengan mereka, misalnya suku mereka, agama mereka, ataupun daerah mereka.¹¹

Budaya politik lokal di Indonesia sampai dengan saat ini pada umumnya cenderung masih bersifat parokial di satu pihak dan subjelk di pihak lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat lokal masil jauh tertinggal dalam hak dan kewajban politiknya akibat pengalaman politik masa lalu, seperti imperialisme, feodalisme dan patrimonialisme. Hanya sebagian kecil elit politik, dan masyarakat (perkotaan) terbanyak di Jawa yang sudah memiliki budaya partisipan, karena ditopang oleh kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang relatif tinggi. 12

Tipe budaya politik parokial kaula ini ternyata melahirkan kecenderungan sikap dan perilaku yang sangat militan ketimbang toleran. Dalam tingkat militansi yang tinggi, perbedaan tidak di arahkan pada usaha musyawarah untuk mufakat, tetapi (bahkan) dianggap sebagai pertentangan pendapat dan keyakinan. Masalah perbedaan sering "dipribadikan" sehingga bersifat sangat sensitif, dapat membakar emosi dan menimbulkan konfrontasi, atau konflik.¹³

2.1.2. Budaya Politik Kaula atau Subjek

Budaya politik subjek lebih tinggi satu derajat dari budaya politik parokial. Dalam sebuah masyarakat yang mempunyai kecenderungan

¹¹ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 85-86.

¹² Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 86.

Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 86-87.

sikap dan orientasi politik dengan karakteristik yang bersifat afektif, maka akan membentuk budaya politik yang bersifat kaula atau subjektif. Masyarakatnya cenderung bersifat "*nrimo*" atau pasrah karena merasa tak berdaya untuk mengubah sistem politik, sehingga bagi mereka tiada jalan lain selain harus tunduk, patuh, setia, dan mengikuti segala instruksi serta anjuran penguasa atau pemimpin politiknya.¹⁴

Meskipun demikian, mereka masih tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Mereka akan merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik. Mereka patuh kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilu. Oleh sebab itu, mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Di ujung yang lain, saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. ¹⁵

Dalam budaya politik subjek, demokrasi sulit untuk berkembang, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan

_

¹⁴ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 83.

¹⁵ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 84.

berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem budaya politik. Budaya politik subjek banyak berlangsung di negara-negara yang kuat (*strong government*), tetapi bercorak otoritarian atau totalitarian. Misalnya, budaya ini pernah terjadi di Indonesia di saat pemerintah Presiden Soeharto (masa Orde Baru). Di masa tersebut, orang jarang ada yang berani membincangkan masalah politik secara bebas, terlebih lagi mengkritik Presiden ataupun keluarganya. Gejala seperti ini juga terjadi di Cina, Korea Utara, Kuba, atau sebagian negara makmur seperti Arab Saudi, Singapura, ataupun Malaysia, yang sistem politiknya belum sepenuhnya demokrasi. ¹⁶

2.1.3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan ditandai oleh adanya perilaku seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan adalah telah mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik, atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara dalam pemilu. juga,mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa

¹⁶ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 84-85.

mereka dapat memenuhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan, dan Selain itu mereka memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok proses bila terjadi praktik praktik pemerintahan yang *fair*, berbagai penyimpangan yang terjadi.¹⁷

Selain itu, masyarakat memiliki kompetensi politik yang tinggi, dimana warga masyarakat mampu memberikan evaluasi terhadap proses politik yang sedang berjalan, akan membentuk sebuah budaya politik yang partisipasi. Masyarakat sudah mulai melibatkan diri secara intensif dalam berbagai kegiatan politik. mereka bisa merupakan anggota aktif organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau partai politik, atau anggota masyarakat biasa yang dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistem politik sebagai totalitas, masukan atau keluaran kebijakan pemerintah, maupun posisi dirinya sendiri dalam berpolitik.¹⁸

Pada pokoknya dalam budaya politik partisipan telah tergambar bahwa individu telah mengerti bahwa mereka adalah warga Negara yang jumlah maupun kewajiban. Hak misalnya untuk menyatakan pendapat, memperoleh pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan di sisi lain kewajiban untuk misalnya, membayar pajak, bela negara, patuh pada hokum atau peraturan pemerintahan dan sebagainya.

¹⁷ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 81-82.

¹⁸ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82.

Dalam budaya politik partisipan, warga merasa bebas dan berani mendiskusikan masalah politik. Mereka merasa pada tingkatan tertentu, dapat memengaruhi jalannya perpolitikan negara. Meraka pun merasa bebas dan mampu mendirikan organisasi politik baik untuk memprotes ataupun mendukung pemerintah. Jika tidak mendirikan organisasi politik, mereka pun banyak bergabung ke dalam organisasi sukarela baik bersifat politik maupun tidak. Saat mengikuti pernilu mereka cukup berbangga hati. 19

Dalam konteks demokrasi, budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat *efficacy* atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukkan oleh warga negara.

Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu, warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (*trust*) antarwarga negara. Budaya politik partisipan utamanya banyak terjadi di negara-negara dengan tingkat kemakmuran dan keadilan yang cukup tinggi. Jarang budaya politik partisipan terdapat di negara-negara

¹⁹ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82.

yang masih bercorak otoritarian, totaliter, ataupun terbelakang secara ekonomi. Atau, jika tidak makmur secara ekonomi, maka budaya politik partisipan muncul dalam sistem politik yang terbuka seperti Demokrasi Liberal.²⁰

2.2. Partisipasi Politik

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya (Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, 2006), kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.²¹ Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.²²

Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (action), yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.²³ Pendapat yang sama diungkapkan oleh Rasinski dan Tyler yang mengungkapkan bahwa inti partisipasi politik adalah tindakan masyarakat

²⁰ Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik,

⁽Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 83. ²¹ Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2006), hlm.

Y. Slamet, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm. 7.

²³ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisapasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 5.

yang dapat memengaruhi keputusan politik. Asumsinya orang yang paling tahu tentang keinginan (masyarakat) adalah masyarakat atau individu. Oleh karena itu, partisipasi politik individu dalam masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah, yang menyangkut harkat kehidupan mereka.²⁴

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang menyadari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang yang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi Keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.²⁵

Berikut ini dikemukakan sejumlah "rambu-rambu" partisipasi politik. Pertama, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam Yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Kedua, kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk

.

²⁴ Kenneth A. Rasinski and Tom R. Tyler, Political Behavior Annual, Vol. 1, Colorado: Westview Press, 1986, hlm. 110

²⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 140.

ke dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. Ketiga, kegiatan yang berhasil (afektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Keempat, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik. Kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (nonviolence) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka dan menulis surat maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti demonstrasi (unjuk rasa), masyarakat ini pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huruhara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakangerakan politik seperti kudeta dan revolusi.²⁶

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah

_

²⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 142.

mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif merupakan kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja Setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *Input* dan *Output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*.²⁷

Sementara itu, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator. Artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum yang pernah dilaksanakan. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Yang dimaksud dengan partisipasi kolektif ialah Kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Partisipasi politik kolektif dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 142.

yang konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional (*agresif*), seperti pemogokan yang tidak sah, menguasai bangunan umum, dan huru-hara.²⁸

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein (Sigit Wijaksono, 2013), bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyrakat.²⁹ Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

- 2.2.1. Citizen control, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakt memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihakpihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.
- 2.2.2. Delegated power, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu.
 Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus

²⁹ Sigit Wijaksono, "Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman", Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013, hlm. 27.

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 143.

- mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.
- 2.2.3. Partnership, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masayrakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.
- 2.2.4. Placation, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.
- 2.2.5. Consultation, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan

- lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.
- 2.2.6. Informing, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.
- 2.2.7. Therapy, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
- 2.2.8. Manipulation, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.³⁰

Delapan tangga partisipasi yang telah dijelaskan ini memberikan pemahaman bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk manipulasi

28

³⁰ Sigit Wijaksono, "Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman", Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013, hlm. 27-28.

program partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (devious methods) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sebagaimana Hessel mengutip pernyataan Nelson yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi, yaitu :

- 2.1.1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
- 2.1.2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.³¹

Jadi, seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa tangung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Pendapat dari Hicks juga dikutip oleh Hessel terkait merumuskan rasa tanggung jawab sebagai suatu kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang

_

³¹ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 323-324.

bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui semua hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas.

Rasa tanggung jawab ini memliiki implikasi positif yang luas bagi proses pembangunan, sebab didalamnya masyarakat berkesempatan belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan ke hal-hal yang lebih besar, memiliki keyakinan akan kemampuan diri sendiri, mempunyai kesempatan memutuskan sendiri apa yang dikehendakinya, dan lebih jauh lagi masyarakat merasa memiliki hasil-hasil dari pembangunan itu.

2.3. Konsep Perilaku Pemilih

Firmanzah (2012), Pemilih di artikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah sekelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu idiologi tertentu kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.³²

Sementara perilaku memilih menurut Surbakti adalah "aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or no to vote*) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau

³² Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2012), hlm. 480.

mendukung kandidat tertentu". Perilaku memilih ini di tentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah.

- 2.3.1. Isu dan kebijakan politik (issues and policies), mempersentasikan/ program (platform) yang di perjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.
- 2.3.2. Citra sosial (social imagery), menunjukan stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan assosiasi antara kandidat atau partai dan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. Citra sosial bisa terjadi berdasarkan banyak faktor, antara lain demogratif, sosial ekonomi, kultur, dan etnik, serta politis ideologis.
- 2.3.3. Perasaan emosional (*emotional feelings*) adalah dimensi yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang di tunjukkan oleh kebijakan politik yang di tawarkan.
- 2.3.4. Citra kandidat (*candidate personality*) mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat.
- 2.3.5. Peristiwa mutakhir (*currents events*), mengacu pada peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembangmenjelang dan selamakampanye.
- 2.3.6. Peristiwa personal (personl event), mengacu pada kehidupan pribadi dan pristiwa yang pernah dialamai secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual,skandal bisnis,

menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh perjuangan, ikut berperang, dan sebagainya.

2.3.7. Faktor-faktor efisdemik (*episdemic issues*) adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal baru.³³

Referensi pemilih seringkali terbentuk oleh lebih dari satu faktor yang satu dengan yang lain saling meneguhkan. Kombinasi dari beberapa faktor tersebut dapat membentuk sebuah citra tertentu dalam benak pemilih.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan pemikiran penulis dalam melakukan penelitian mengenai Budaya Politik Masyarakat Adat Karampuang dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019. Penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi dan pembanding dalam proses penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang disajikan disini adalah penelitian yang terkait dengan penanganan Budaya Politik. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan yaitu:

2.4.1. Munadi (2015) Budaya Politik Masyarakat Samin (Sedulursikep) (Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukalilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah). Budaya politik suatu masyarakat tertentu berbeda dengan budaya politik masyarakat lainnya. Berdasarkan hal tersebut, tipe-tipe budaya

³³ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2012), hlm. 480.

politik dapat digolongkan dalam beberapa tipe antara lain: Budaya Politik Parokial, Budaya Politik Subjek/Kaula, Budaya Politik Partisipan dan Budaya Politik Campuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tipe budaya politik, hubungan masyarakat, dan Struktur sosial masyarakat Samin (sedulur Sikep) Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Budaya Politik Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan cukup baik. Tipe budaya politik masyarakat Samin mengarah pada dua tipe budaya politik. Hubungan pemerintah dengan Masyarakat Samin berjalan selaras dan harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti terdapat organisasi kemasyarakatan yang terdapat dalam lingkungan tempat tinggal, karena manusia hidup bersosial dan berkomunikasi untuk menuju perubahan sosial yang lebih baik dan maju. Dalam setiap kelompok/komunitas tertentu pasti terdapat struktur sosial organisasi kemasyarakatan, hal itupun

terdapat dalam Samin Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.³⁴
Dalam penelitian di atas menguraikan tentang bagaimana Budaya Politik Masyarakat Samin Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukalilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dalam penelitian diatas menguraikan tentang bagaimana tipe-tipe masyarakat Samin.

2.4.2. Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si. (2004) Studi tentang Pola Kepemimpinan Uwa' dalam Merespon Perubahan Sosial pada Masyarakat Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Penelitian bertujuan ini untuk mengetahui kepemimpinan Bangsawan (Uwa') dalam merespon perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Tolotang serta untuk mengetahui faktor-faktor yang melestarikan kepemimpinan Uwa' pada komunitas Tolotang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuaklitatif ini metode deskriptif vang berusaha menderskripsikan berbgai faktor-faktor signifikan berkenaan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kepemimpinan uwa' dalam merespon perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Tolotang adalah kombinasi pola kepemimpinan direktif, kosukltatif dan partipasipatif.

[.]

³⁴ Mudani, "Budaya Politik Masyarakat Samin (*Sedulursikep*) (Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukalilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah)", *Tesis*, (Semarang: Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Semarang, 2015), hlm. v.

Sedangkan melestarikan kepemimpinan faktor yang Uwa' diklasifikasi dalam 3 (tiga) faktor yaitu faktor budaya, ekonomi dan politik.³⁵

Dalam penelitian yang di lakukan di atas membahas mengenai pola kepemimpinan *Uwa'* dalam menghadapai perubahan sosial serta untuk mengetahui faktor-faktor yang melestarikan kepemimpinan Uwa' pada komunitas Tolotang. Untuk mengetahui sikap dari *Uwa'* dalam menghadapi perubahan sosial harusnya penelitian diatas harus membahas mengenai faktor-faktor juga apa yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi di tengah masyarakat.

2.4.3. Ira Indra Gerungan (2016) Perilaku Memilih Masyarakat Desa Touliang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 (suatu Studi di Desa Touliang Kakas Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa). Harus di akui penelitian perilaku pemilih di Indonesia, masih bisa dikatakan relatif baru berkembang. Artinya, masih sedikit sekali data dan literatur yang bisa kita dapatkan guna dijadikan bahan analisa, untuk melihat dinamika perilaku pemilih. Setidaknya ada beberapa alasan yang menyebabkan kenapa studi tentang perilaku pemilih di Indonesia mendapatkan hambatan dalam pengembangannya. Diantaranya adalah, Pemilu dalam kurun waktu lama terutama masa Orba, tidak sungguh-sungguh menjadi tempat dimana pemilih

Muhammad, Studi tentang pola kepemimpinan uwa dalam merespon perubahan sosial pada masyarakat Tolotang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan: laporan penelitian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2004. hlm. 2.

mengekspresikan & menentukan pilihan, karena kebijakan fusi parpol, penerapan massa mengambang, pemberlakuan steril politik di kalangan pemilih desa, dan ada money politics untuk memilih Golkar, dan masih banyak hal-hal lain, telah membuat para peneliti untuk melakukan penelitian tentang perilaku pemilih, menjadi kurang tertarik. Karena keadaan pemilih pada waktu itu tidak situasi sebenarnya dari menggambarkan perilaku Asumsinya, karena perilaku pemilih tidak bisa diteliti mengingat sedemikian besar suara yang diberikan pemilih tidak berdasar pilihan sungguh-sungguh. Selain itu juga kenapa perilaku pemilih ini kurang menarik sebagai bahan untuk diteliti karena, absennya studi survei pendapat umum dalam kurun waktu lama, sebagai akibat dari kebijakan kontrol politik Orba terhadap berbagai kegiatan penelitian. Baru setelah tahun 1998, dengan tumbangnya Orba dan dihapusnya berbagai kebijakan represif, studi perilaku pemilih ini mulai mendapat perhatian. Ada banyak studi mengenai Pemilu di Indonesia, tetapi sebagian besar menyoroti aspek instutusi atau proses Pemilu, seperti kajian mengenai partai politik, dinamika Pemilu, konflik di dalam parpol, konflik Pemilu dan sebagainya, namun jarang tentang perilaku pemilih. Pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak diseluruh Indonesia yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 lalu, berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, masyarakat di Kecamatan Kakas Barat, Desa Touliang tidak semua memberikan hak pilih. Kenapa hal ini terjadi, menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai factor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu. ³⁶

2.4.4. Frets Alfret Goraph dan Herson Keradjaan (2018) Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Budaya Politik Pemilih Desa Adat (Studi Kasus Tentang Tipologi Pemilih Desa Kakara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara). Pemilihan kepala daerah Maluku Utara 2013-2018 berimplikasi terhadap desain strategi marketing politik. Budaya politik pemilih desa adat di Desa Kakara berdampak pada segmentasi tipologi pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Strategi marketing politik kandidat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih. Kemudian dinamika politik uang dan kampanye hitam tidak bisa dihindari oleh masyarakat desa adat ketika proses pemilihan kepala daerah. Pentingnya penelitian ini adalah bagaimana menjelaskan dan menganalisa budaya politik pemilih yang ada di desa adat desa Kakara dalam pilkada kemudian hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi budaya politik Tokoh Adat di desa adat. Temuan dalam penelitian ini bahwa Pertama; memang diakui oleh beberapa

³⁶ Ira Indra Gerungan, "Perilaku Memilih Masyarakat Desa Touliang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 (suatu Studi di Desa Touliang Kakas Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Politico*, Volume 5 Nomor 1, 2016, hlm 1.

Tokoh Adat bahwa dalam kontestasi pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2013, sering terjadi jual janji politik masa kampanye kepada masyarakat dengan menawarkan program kerja serta kebijakan yang akan diambil jika terpilih. Kedua, kandidat yang menggunakan Adat-Budaya sebagai mesin politik tidak terlalu berpengaruh terhadap Tokoh Adat melainkan janji politik kandidat yang telah ditepati baru kemudian dipilih, Ketiga; tidak bisa dipungkiri bahwa politik uang sering terjadi dan itu dilakukan oleh beberapa kandidat gubernur namun kurang berpengaruh terhadap Tokoh Adat melainkan sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat. Keempat, budaya politik Tokoh Adat cenderung cukup rasional ketika diperhadapkan dengan persoalan politik uang, agama, etnis, dan adat-budaya sebagai mesin politik kandidat, guna mempengaruhi pilihan politik Tokoh-Tokoh Adat Desa Kakara, Kelima; beberapa kandidat turut membawa adat-budaya dalam arena politik dan faktor adat juga sangat mempengaruhi perilaku pemilih Masyarakat Adat di Desa Kakara pada pemilihan gubernur Maluku Utara Tahun 2013.37

Dalam penelitian diatas membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat desa adat Kakara dalam Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. Kelebihan dari penelitian

_

³⁷ Frets Alfret Goraph dan Herson Keradjaan, "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Budaya Politik Pemilih Desa Adat (Studi Kasus Tentang Tipologi Pemilih Desa Kakara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara)", Jurnal, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Halmahera, hlm. 1

diatas menguraikan secara jelas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat adat dalam memilih yaitu: program kerja yang di tawarkan calon kepala daerah, masyarakat lebih percaya kepada calon yang sudah memiliki bukti kerja nyata, faktor politik uang yang masih terjadi disetiap penyelenggaraan pemilu, pemilih sudah rasional dalam menggunakan hak suara dan terakhir adalah faktor adat yang mempengaruhi perilaku memilih. Sedangkan kekurangan penelitian diatas tidak mengaitkan dengan teori budaya politik yang ada. Seperti teori budaya politik yang di kemukakan oleh Almond, Verba maupun teori-teori tentang perilaku politik.

2.4.5. Ahmad Mustanir dan Irfan Jaya (2016) Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Politik terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku memilih Towani Tolotang di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berpengaruh, karena dilihat dari hasil olah angket dari setiap indikator pertanyaan sesuai dengan hasil penelitian yang telah di lakukan menunjukkan bahwa persentase pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku memilih TowaniTolotang di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 71%, dimana ini tergolong dalam kategori berpengaruh. Pengaruh budaya politik terhadap perilaku memilih Towani Tolotang di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berpengaruh, karena dilihat dari hasil olah angket dari setiap indikator pertanyaan sesuai dengan hasil penelitian yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa persentase Pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku memilih Towani Tolotang di kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 69%, dimana ini tergolong dalam kategori berpengaruh.³⁸

Penelitian di atas membahas mengenai pengaruh kepemimpinan *Uwa'* dan budaya politik masyarakat Towani Tolotang terhadap perilaku memilih mereka. Kelebihan dari tulisan di atas adalah menyajian pengaruh *Uwa*, dalam bentuk presentase untuk menentukan tingkat pengaruhnya sedangkan kekurangannya adalah peneliti tidak memberikan studi kasus tehadap pemilihan yang berlangsung tetapi hanya menjelaskan perilaku memilih mereka secara umum.

Dari empat studi pustaka diatas, dilakukan perbandingan menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan kajian penelitian penulis. Persamaan terlihat pada topik penelitian yaitu Budaya Politik masyarakat adat dalam menghadapi kontestasi politik baik pada pemilihan legislatif maupun pada pemilihan kepala daerah. Adapun perbedaan pada ruang lingkup kajian dan hasil penelitian yang dicapai peneliti terdahulu mengkaji tentang pengaruh dan peran pemimpin adat dalam kontestasi

³⁸ Ahmad Mustanir & Irfan jaya, "Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Politik terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang", *Jurnal*, (Vol.04 No.1 2016), hlm. iii.

politik. Sedangkan peneliti lebih melihat bagaimana sikap dan perilaku masyarakatnya dalam menghadapi pemilihan legislatif pada tahun 2019 di kabupaten Sinjai. Selain itu, peneliti juga ingin melihat bagaimana preferensi masyarakat adat Karampuang dalam kontestasi politik yang berlangsung.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir ini disusun sebagai landasan penelitian yaitu untuk menguji teori mengenai budaya politik dan perilaku mereka terhadap pemilihan legislatif yang dilaksanakan di kabupaten Sinjai tahun 2019. Dalam konteks masyarakat adat yang masih memegang teguh adat istiadat, tentunya ketua adat/pemangkuh adat juga mempunyai pengaruh besar dalam memobilisasi masyarakatnya memilih salah satu calon. Mereka menganggap bahwa perintah pemangkuh adat adalah mutlak dan harus di patuhi. Tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat adat tidak sepenuhnya lagi patuh terhadap pemimpin adat. Mereka hanya patuh dalam bidang-bidang tertentu misalnya bidang spiritual dan keagamaan.

Budaya Politik mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam menetukan sebuah pilihan. Dengan menggunakan teori budaya politik, penulis melihat sikap dan perilaku mereka dalam memilih. Setelah melihat sikap dan perilaku masyarakat adat Karampuang, peneliti kemudian menentukan preferensi mereka dalam memilih salah satu calon legislatif. Untuk menetukan sikap dan perilaku mereka dalam memilih, terntunya penulis harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga

mendengarkan ketua adat ataupun sebaliknya. Selain itu, faktor pembentuk preferensi juga harus di ketahui sebelum menarik kesimpulan mengenai keberpihakan mereka terhadap salah satu calon legislatif di pemilihan umum DPRD kabupaten Sinjai tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyusun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut :

